

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki agenda politik bersama untuk memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Mereka bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan politik dan sosial masyarakat serta mengartikulasikan aspirasi pemilih. Partai politik juga berperan sebagai wadah bagi calon pemimpin untuk memasuki arena politik dan bersaing dalam pemilihan umum. Dengan struktur organisasi yang terorganisir, mereka melakukan berbagai kegiatan politik seperti kampanye, advokasi, dan pemilihan umum untuk mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi dan pembentukan kebijakan negara.

Seorang akademisi Indonesia, Subakti (1992:113), mengacu pada karya Joseph Laporombara dan Myron Weiner dalam buku mereka "The Origin and Development of Political Parties," merangkum berbagai teori tentang asal-usul partai politik. Menurutnya, terdapat tiga teori yang berupaya menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan mengaitkan hubungan antara parlemen awal dan munculnya partai politik. Kedua, teori situasi historis memandang munculnya partai politik sebagai respons dari sistem politik terhadap krisis yang terjadi akibat

perubahan masyarakat secara besar-besaran. Ketiga, teori pembangunan memandang partai politik sebagai hasil dari modernisasi sosial-politik.

Partai memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan politik demokratis yang sepenuhnya representatif. Meskipun seringkali tidak dianggap positif secara umum, demokrasi tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya sistem partai yang dinamis, bersaing, dan responsif.

Kehadiran partai politik dalam konteks negara demokratis memiliki signifikansi yang besar dalam struktur pemerintahan. Prinsip "kemerdekaan berserikat dan berkumpul" yang diatur dalam konstitusi menjadi landasan bagi peraturan-peraturan politik dalam pembentukan undang-undang.

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil”.

Sigmund Neuman dalam buku karyanya *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.”

Mark N. Hogopain (Pradja, J. S., 2013: 123) mendefinisikan:

“Partai politik adalah organisasi yang dibentuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan public dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.”

Sedangkan Austin Ranney (Pradja, J. S., 2013: 123) mendefinisikan:

“Partai politik berdasarkan karakteristik dasar yang dimiliki oleh partai politik”.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya empat fungsi partai poolitik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo, ialah:

- 1) Sarana komunikasi politik;
- 2) Sarana sosialisasi politik;
- 3) Sarana rekrutmen politik;
- 4) Pengatur konflik;

Russell Dalton dan Martin P. Wattenberg membuat sub-klasifikasi fungsi yang dilayani oleh partai dalam masyarakat demokratis. Sub-klasifikasi fungsi tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- 2.1.1 Mobilisasi pemilih dan mengorganisir pilihan pemilu;
- 2.1.2 Memasukkan pemilih dalam pengambilan keputusan politik;
- 2.1.3 Merekrut kepemimpinan politik suatu negara melalui pembuatan kebijakan dan administrasi urusan publik sehubungan dengan masalah sosial yang paling

mendesak, namun tetap bertanggung jawab atas kebutuhan pendukung tingkat basis.

2.1.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang biasa kita sebut dengan singkatan pemilu ini kemudian menjadi persoalan politik dan pergantian kepemimpinan. Karena baik itu pemilu, politik, dan pergantian kepemimpinan saling berkaitan. Pemilu yang digelar tak lebih dari isu politik terkait soal pergantian kepemimpinan.

Pemilu sangat penting bagi demokrasi yang mapan di Indonesia. Dalam sebuah pemilu, keinginan rakyat Indonesia berjalan baik. Hal yang sama dalam pemilihan, dimana pemilih akan memiliki keleluasaan dan kandidat dapat menyampaikan misi, dan platform calon sehingga mereka pun tau akan tujuan negara akan dibawa kea rah mana.

Secara teoretis, pemilu dipandang sebagai tahapan pertama dalam kaitan kehidupan politik yang demokratis, sehingga pemilu menjadi roda penggerak mekanisme institusi poltik demokrasi.

Bagi negara yang menakamakan dirinya demokrasi, pemilu ialah suatu keharusan. Pemilihan umum selama ini dipandang sebagai masalah politik yang utama karena selalu terkait dengan masyarakat untuk memenuhi syarat tertentu. Dan melalui pemilihan umum juga, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara diplomatis.

Ada beberapa asas yang digunakan pemilihan umum yang bisa dijadikan referensi pelaksanaan pemilihan umum. Prinsip tersebut perlu dijunjung tinggi dalam

pelaksanaannya, karena asas tersebut juga dijadikan sasaran untuk pemilihan umum.

Berikut asas-asasnya yaitu:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Maka dari itu, pemilu memiliki tujuan yang berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya yang berisi:

1. Memperkuat sistem politik yang demokratis;
2. Melaksanakan pemilihan umum yang berintegritas dan adil;
3. Menjamin stabilitas pengaturan sistem Pemilu;
4. Memberikan ketegasan hukum dan mengantisipasi penggandaan dalam pengaturan pemilihan umum; dan
5. Melaksanakan pemilihan umum yang praktis

Setelah menyelenggarakan sebelas kali pemilu sejak kemerdekaan, Indonesia memasuki babak baru dalam dunia pemilu dengan digelarnya pemilu serentak di tahun 2019. Perubahan pada sistem ini adalah waktu pemilihan umum menjadi pemilihan serentak dengan diadakannya pemilihan serentak. Pemilihan Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR, DPD, dan DPRD. Mempertimbangkan perubahan waktu pelaksanaan pemilu 2019 menjadi pemilu serentak adalah dalam semangat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan hasil pemilu. Beberapa kekhawatiran yang tidak sempurna tentang pelaksanaan dan hasil pemilu sebelumnya, seperti hasil pemilu yang tidak proporsional, sistem multi-partai yang ekstrim, dan efektivitas manajemen pemerintahan, belum mencapai yang

diinginkan. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi untuk menciptakan desain yang lebih baik demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019, Indonesia memasuki babak baru sistem pemilu dengan menggelar pemilu serentak lima kotak untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD/Kabupaten/Kota.

2.1.3 Strategi Politik

Istilah strategi berawal dari bahasa Yunani “*strategia*”, artinya pemimpin pasukan. *Strategia* bermula dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Kata strategi ini digunakan oleh para militer dari zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai dengan awal industrialisasi. Kemudian kata strategi itu menyebar ke berbagai sudut pandang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bagian komunikasi, politik dan komunikasi politik. Ini menjadi hal utama memecahkan persoalan dalam kemenangan pertarungan pada pemilu, dan pada penentuan suatu keputusan politik lainnya. (Schroder, 2013)

Menurut Salusu, seni yang merupakan strategi memanfaatkan sumber daya suatu kelompok dan keahlian guna memperoleh sasarannya dengan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya yang bermanfaat satu sama lain. (Salusu, 2006). Ada dua jenis strategi, strategi rencana dan strategi taktik. Strategi rencana merupakan sejenis program untuk meraih serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan, begitupun dengan konsep strategi perencanaan. Sementara itu, strategi taktik merupakan sebuah langkah khusus untuk membohongi pesaing. (J, 2003)

Tujuan strategi menurut Von Clausewitz yang terlihat bukan hanya kemenangan, tetapi kedamaian dibaliknya. Bagi kami, mengetahui hal ini sangat penting untuk merencanakan strategi politik. Maka dari itu, ini merupakan hal yang utama untuk memastikan apa yang melatarbelakangi suatu pencapaian akhir sebuah kemenangan pemilu, atau apa yang ditetapkan saat regulasi baru diberlakukan. Banyak tujuan strategis dalam ranah politik yang terungkap, yaitu: perlombaan untuk memperkaya diri, perebutan kekuasaan, perebutan tujuan terselubung, maupun yang berbeda dari tujuan yang diumumkan secara publik. (Schroder, 2013)

Keterkaitan antara strategi dan politik merupakan keterampilan tentang cara yang dilakukan oleh ahli politik untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Strategi Politik Menurut Peter Schroder

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Strategi politik adalah rencana untuk tindakan dimana penulisan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Ada dua jenis strategi politik yang dijelaskan menurut Peter Schroder yaitu:

g. Strategi Ofensif (menyerang)

Strategi ofensif selalu dibutuhkan jika sebuah partai berkeinginan untuk meningkatkan partisipasinya atau jika seorang administrator ingin mengimplementasikan sebuah program. Dikarenakan semua strategi ofensif yang digunakan dalam kampanye pemilu harus menunjukkan perbedaan secara transparan dan unik antara suatu kekuatan politik dengan partai competitor yang ingin diambil alih oleh pemilih. Selain itu adapula strategi persaingan yang faktual, yaitu masing-masing pihak memperebutkan sekelompok pemilih dalam rentan kemampuannya. Strategi ini harus mampu merancang sebuah acara pengenalan untuk mengartikan kepada masyarakat negosiasi mana yang menguntungkan dibandingkan partai lainnya. Untuk merumuskan negosiasi baru ini jika memanfaatkan perubahan nilai atau struktural yang terjadi di masyarakat. Tema yang tidak laris manis kemungkinan besar tidak akan memperluas pasar.

h. Strategi Defensif (bertahan)

Tentang strategi mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisional) dan menutupi serangan dari pihak lain. Strategi defensif akan hadir jika salah satu partai berkuasa atau koalisi pemerintah multi partai ingin melindungi sebagian besar mayoritasnya dan jika *potential constituen* (pemilih potensial) berkeinginan mempertahankannya. Selanjutnya, strategi defensif juga hadir jika turnamen atau dasar faktor tidak lagi dipertahankan atau ingin ditutup, dan penutupannya dapat menjanjikan manfaat yang sebesar-besarnya.

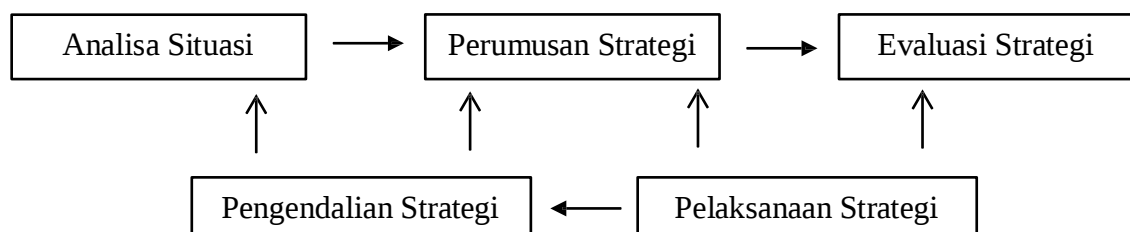
Perancangan strategi dan proses politik untuk perubahan adalah gambaran dimana keadaan kekuasaan yang jelas tentang pencapaian akhir yang hendak diraih dan memusatkan seluruh upaya untuk mencapainya. Dari uraian rencana tersebut dapat ditarik perumusan tujuan masa depan, tanggapan yang diperoleh dan identifikasi strategi untuk mengimplementasi tujuan secara praktis.

Pada masyarakat demokratis, pengambilalihan kekuasaan dan akses terhadap akibat yang dicapai melalui berbagai bentuk pemilihan yang demokratis. Tujuannya untuk mendapatkan pasangan suara yang cukup di pasar pemilu. Oleh karena itu, perlun adanya kekuasaan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemilu.

Sun Tzu berkata bahwa kemampuan untuk tidak terkalahkan terletak pada diri sendiri, dan kesempatan untuk mengalahkan musuh terletak pada diri sendiri. Jadi, hal pertama yang harus dilaksanakan ialah mengatasi sendiri setiap kelemahan, menghindari serangan yang tidak perlu dan menjadi penerima manfaat. Untuk model Sun Tzu, penilaian strategis implementasi dan pemantauan merupakan prioritas utama perencanaan konsep. (Schroder, 2013)

Bagan 2. 1

Model Perencanaan Sun Tzu:



(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Strategi mempunyai tujuan yaitu untuk selalu “menang”. Kemenangan itu akan tetap menjadi titik pusat, entah itu dalam pemberdayaan, perolehan suara tambahan, kandidat pemenang pemilu, atau perolehan suara mayoritas saat menetapkan aturan atau kebijakan.

Pada proses perancangan politik, ada dua prioritas. Yaitu yang pertama model perancangan berbasis SWOT dan yang kedua “rencana konseptual”. Timbang semua potensi atau kekuatan dan kelemahan partai untuk membuat keputusan strategi yang baik dan tepat sasaran. Berbagai keputusan strategis, kebijakan, rencana, tujuan, sasaran, dan implementasi di bidang ini didasarkan pada hasil kajian lingkungan yang dilakukan sebelumnya. Outputnya adalah kajian SWOT yang sukses.

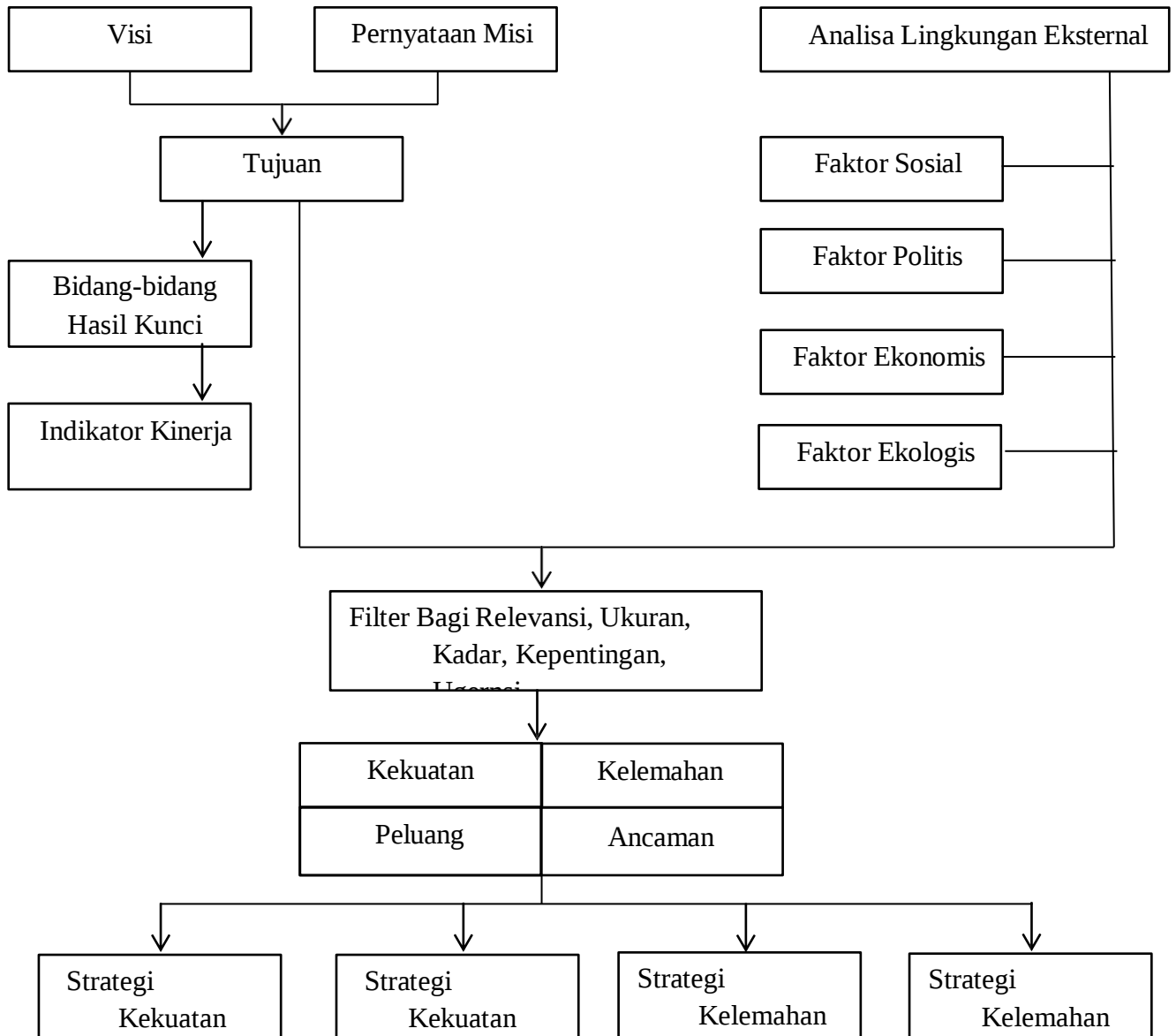
Menurut SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Treats*), perancangan strategi yang baik bergerak pada dua tingkatan. Pada tingkat pertama, perancangan strategis dengan jelas menggambarkan kemana organisasi ingin pergi (visi) dan mengapa organisasi itu ada (definisi atau pernyataan misi). Berdasarkan dari visi dan tujuan ini, perancangan strategi mengembangkan tujuan yang mewakili hasil akhir yang dapat diukur secara kualitatif dan dihitung secara kuantitatif. Langkah ini dapat membuktikan apakah organisasi mendekati atau menjauh dari visi dan tujuan utama. Dalam hal ini, strategi harus mengidentifikasi area mana yang diharapkan menjadi tujuan utama (*key result area*), usaha apa yang diperlukan, dan area mana yang dapat dipantau dan dievaluasi menggunakan indikator kinerja tertentu. (Schroder, 2013)

Pada tingkat kedua, perencana strategis berusaha memposisikan organisasi sesuai dengan realitas lingkungan tempatnya beroperasi. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis: lingkungan eksternal adalah area suatu kekuatan atau faktor lain melibatkan atau dilibatkan oleh organisasi. Dan yang kedua yaitu lingkungan internal, yang terdiri dari sumber daya, peluang, kekuatan dan kebutuhan dalam organisasi. Perancangan strategis diharuskan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan visi dan tujuan organisasi.

Bagan 2. 2

Visi, Pernyataan Misi, Tujuan, Bidang-bidang Hasil Kunci, dan Indikator

Kinerja



(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Penjelasan memberikan arahan kepada organisasi dan dibatasi oleh visi. Ini merupakan suatu dorongan dari sebuah institusi dan juga merupakan alasan utama keberadaannya. Visi ini diharuskan cukup luas hingga dapat menginspirasi pada setiap anggotanya, namun juga harus cukup sempit sehingga dapat focus pada tindakan-tindakan yang harus diambil.

Sementara itu, terdapat 10 langkah perencanaan konseptual berikut adalah langkah-langkah yang terbagi dalam 3 fase, yaitu:

1. Perumusan misi dan kajian situasi
2. Keputusan strategis
3. Implementasi strategi

Adapun 10 langkah perencanaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Rumusan misi

Perumusan misi yang pertama menggambarkan perencanaan strategis yang diperlukan. Diharuskan mampu menyediakan setidaknya tiga komponen yang menguraikan tujuan keseluruhan dari posisi yang ingin dicapai. Kedua, alasan mengapa meraih tujuan keseluruhan itu penting, dan yang ketiga, kerangka waktu di mana tujuan keseluruhan harus terwujud

2. Penilaian situasional

Kebenaran yang terkumpul dikategorikan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan kemungkinan mencapai tujuan. Fakta-fakta ini adalah kebenaran tentang organisasi itu sendiri, kebenaran tentang karyawannya, dan kebenaran tentang lingkungan di mana organisasi itu diwujudkan.

3. Rumusan sub strategi

Ketika penilaian situasi berakhir, sudah jelas bahwa strategi akan diterapkan terhadap tujuan yang telah dikembangkan atau yang masih perlu direvisi. Rumusan strategi dibagi menjadi tiga tahap perumusan tugas, perumusan strategi dan evaluasi strategi.

4. Rumusan sasaran

Apabila tujuan strategi sudah ditentukan lalu diserahkan kepada unit taktis untuk diterapkan melalui klasifikasi tugas. Tujuan dapat memaparkan keadaan pada akhir proses dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini harus dapat terwujud, dengan fokus pada poin penting yang disebutkan dalam rencana. Setelah tujuan ditentukan, strategi harus diterapkan dan terlaksana.

5. *Target image* (citra yang diinginkan)

Target image bergantung pada ketetapan strategis tentang rumusan misi dan pilihan tentang isu, gaya, jenis konfrontasi, dan pemain kunci.

6. Kelompok-kelompok target

Kelompok target yaitu sekelompok orang atau organisasi yang penting untuk mencapai misi. Mereka perlu dihubungi dalam waktu yang ditentukan. Kelompok target ini ditentukan dengan menafsirkan keputusan strategis, terutama tujuan taktis, dan dengan menganalisis citra yang diinginkan (*target image*).

7. Pesan kelompok target

Kelompok target membutuhkan informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang dibuat sebelumnya, kemungkinan tanggapan sesuai dengan rencana strategis.

8. Instrumen-instrumen kunci

Pemilihan instrumen kunci dalam kaitannya dengan tindakan dan alat komunikasi yang akan digunakan disesuaikan secara khusus dengan kelompok sasaran.

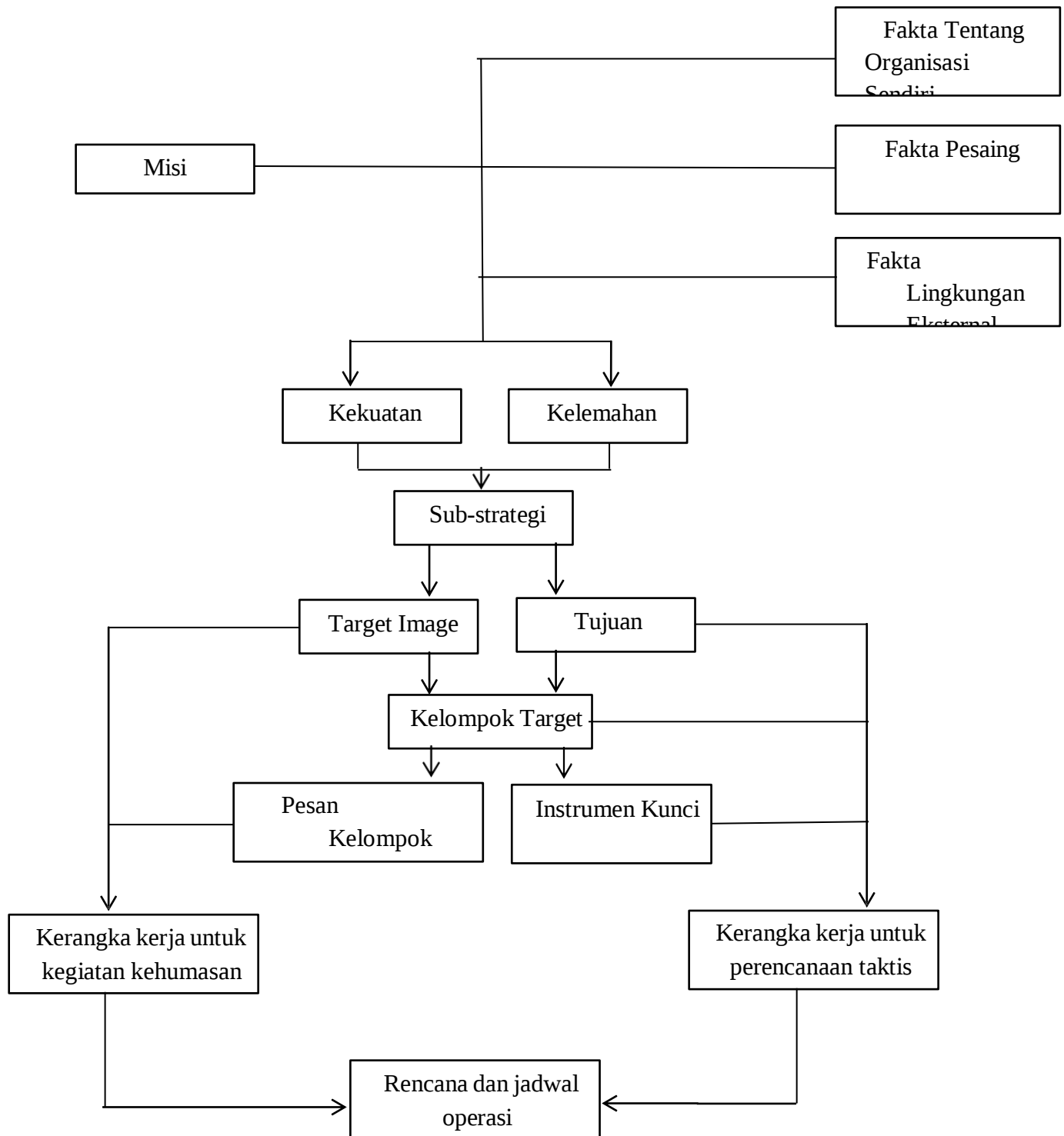
9. Implementasi strategi

Dalam implementasi strategi politik, faktor manusia menjadi sangat penting dalam tiga aspek pemimpin politik, pemimpin partai, dan anggota partai. Kaitan antara ketiganya adalah bahwa kuantitas, kualitas, pendidikan, etika dan motivasi merupakan syarat awal keberhasilan implementasi strategi.

10. Pengendalian strategi

Pengendalian strategis mempunyai dua unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya pengaplikasian strategi. Unsur pertama, prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen kedua adalah prinsip keamanan dan perlindungan informasi itu sendiri, atau mencegah penyusupan dari organisasi lawan.

Bagan 2. 3
Merumuskan Misi



Dalam menerapkan strategi politik, unsur manusia penting dalam tiga bidang pemimpin politik, pemimpin partai *full time*, dan anggota partai *part time* atau sukarela. Keterkaitan antara ketiganya, pendidikan, kualitas, kuantitas, etika dan motivasi adalah syarat awal berhasilnya pengaplikasian strategi. Pada saat yang sama di medan pertempuran, kondisi awal keberhasilannya bergantung pada prinsip kecepatan, kemampuan beradaptasi, dan penipuan. Penundaan yang tidak perlu membahayakan rencana apa pun karena penundaan hanya menyebabkan kelelahan dan kekecewaan dalam organisasi. Oleh karena itu, penundaan harus dihindari. (Schroder P, 2013)

2.2 Kerangka Pemikiran

Bagan 2. 4

Kerangka Pemikiran

